LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NATUNA
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini dapat diselesaikan. (LKjIP) ini merupakan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selama tahun Anggaran 2018.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Ranai, 14 Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NATUNA

INDRA JONI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700903 199201 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Natuna dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKjIP Tahun 2018 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun dalam perjanjian kinerja dimana untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Status Desa Berkembang (%) dengan target 7 Persen atau 5 Desa yang berstatus Desa Berkembang terealisasi sebesar 38.57 persen atau 27 Desa yang berstatus Desa Berkembang dari 70 Desa Desa di Kabupaten Natuna berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun disebutkan “penetapan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

ditetapkan melalui Perubahan Surat Keputusan Derektur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Derektur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemadirian Desa, yakni Desa Binjai, Desa Mekar Jaya, Desa Batubi Jaya, Desa Gunung Putri, Desa Semedang, Desa Cemaga, Desa Cemaga Tengah, Desa Cemaga Utara, Desa Harapan Jaya, Desa Batu Gajah, Desa Tanjung, Desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara, Desa Teluk Buton, Desa Air Payang, Desa Tanjung Pala, Desa Sabang Mawang, Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sededap, Desa Tanjung Batang, Desa Pulau Tiga, Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Batu Berian, Desa Pangkalan, dan Desa Arung Ayam sebagai Desa berstatus berkembang di Wilayah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulaun Riau, sehingga untuk capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan, sehingga untuk capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 dapat terealisasi melebihi target di tetapkan.

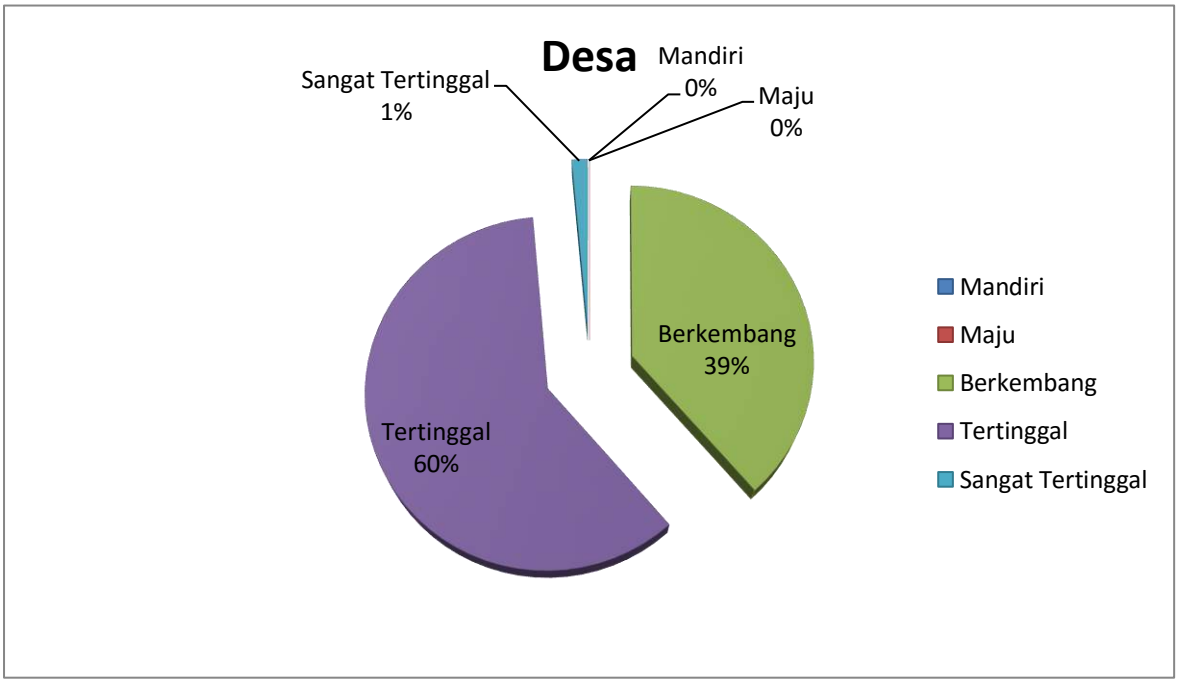

Akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 yang mana total anggaran belanja sebesar Rp. 8,078,144,008.00,-

namun pada saat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mengalami Penurunan Rp. 6,843,812,065.00,-

Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan bahwa dari jumlah dari Belanja Dinas Pembeerdayaan Masyarakat dan Desa di Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4,521,572,266.00,- atau 66.07 Persen sedangkan sebesar Rp. 3,412,172,662.00 atau 75.46 Persen dari Belanja Langung untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dari total belanja Indikator Kinerja Utama terealisasi Rp. 2,539,219,943.00,- atau **74.42 Persen,** sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar **551.00 Persen.**

Efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 sebesar Rp. 3,412,172,662.00,- atau 75.46 Persen. Ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan belanja langsung. Inefisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 1,109,399,604.00,- atau 24.54 Persen.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menekan angka Inefisiensi sebesar **Rp. 1,109,399,604.00,-** atau **24.54 Persen** diupayakan dapat menurunkan lagi angka Efisiensi tersebut, sehingga anggaran belanja langsung lebih mengutamakan kegiatan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		Vi
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Gambaran Umum	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	3
	1.3 Sistematika Penulisan	4
Bab II	Perencanaan Kinerja	6
	A. Rencana Strategis	6
	B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
	C. Program Kerja dan Kegiatan	9
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	12
	A. Capaian Kinerja Organisasi	12
	B. Realisasi Anggaran	18
Bab IV	Penutup	21
Lampiran – lampiran		22

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna 2016-2021	6
Tabel II.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	8
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018	9
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018	9
Tabel II.5	Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018	10
Tabel II.6	Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018	11
Tabel III.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	12
Tabel III.2	Capaian Kinerja dan Kondisi Akhir Renstra	16
Tabel III.3	Analisa capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2016	16
Tabel III.4	Capaian Realiasi Anggaran terhadap Capaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya ***good governance.*** Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinrja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Natuna yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2018.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berubah nama, nomenlaktur dan tupoksi menjadi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018 adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun terntentu.

A. Rencana Strategis

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Natuna terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna 2016-2021

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
VISI : MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN			
MISI 1 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN BERBASIS SUMBERDAYA ALAM PONTENSI DAERAH			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	LPE tanpa Migas (%)	Meningkatkan Kontribusi Industri Pengelolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
MISI 3 : MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT PESISIR, NELAYAN DAN PETANI			
Meningkatkan Tarap Hidup Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)

Rencanana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna 2016-2021.

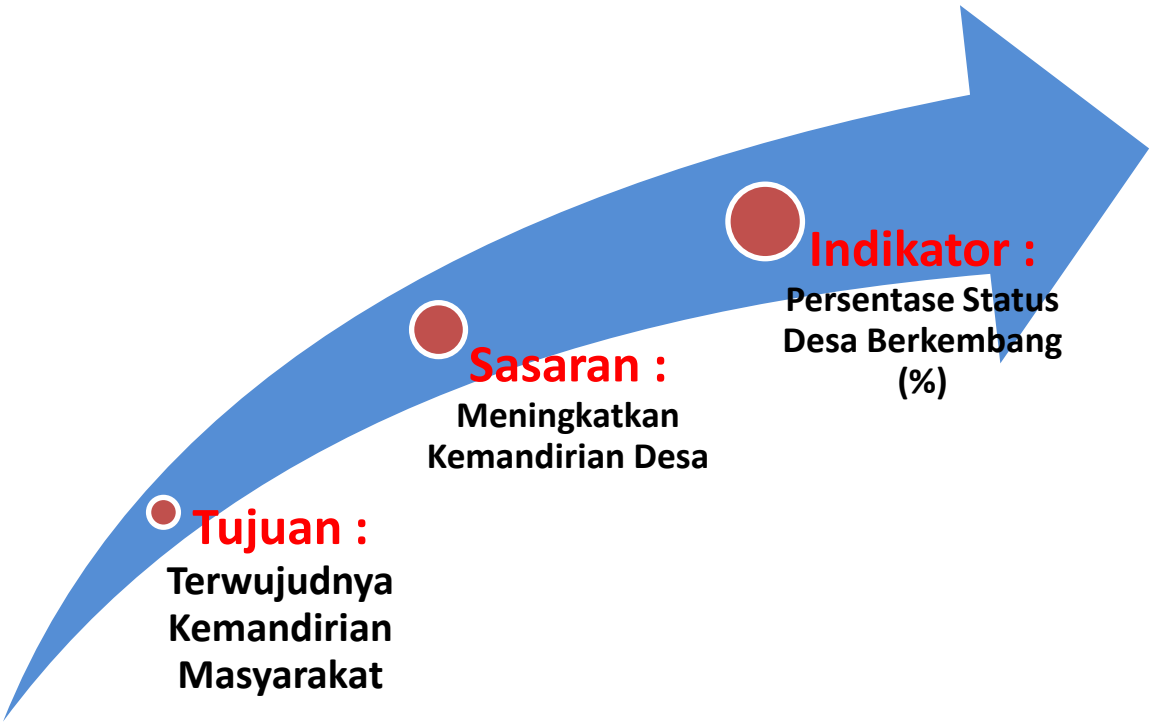

Dokumen Rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Untuk mengukur sejauhmana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan Rencana Startegis 2016-2021 yang terdiri dari :

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR
						1	2	3	4	5	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Terwujudnya Kemandirian Masyarakat	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang (%)	0	%	4	7	10	12	15	15
2	Mewujudkan AKuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja	Nilai/Predikat Akuntabilitas	52	%	55	58	60	65	70	70
			% Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket.
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang	%	7	IKU
2	Meningkatkan Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja	Nilai/Predikat Akuntabilitas	Angka	58	Non IKU
		% Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	Non IKU

Untuk mengukur sejauhmana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	**Meningkatkan Kemandirian Desa**	**Persentase Status Desa Berkembang**	**%**	**7**

C. Program Kerja dan Kegiatan

Secara ringkas keseluruhan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2018 yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.5

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Natuna Tahun 2018

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Taget
1	***2***	***3***	***4***	***5***
Meningkatkan Kemandirian Desa	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**Desa/ Kelurahan**	**12**
	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan	Desa/ Kelurahan	76
	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	Desa/ Kelurahan	76
	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Jumlah PKK Aktif	PKK	91
	Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	70
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri**	**Lembaga**	**7**
	Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah	Jumlah Kelompok Sentra Ekonomi Masyarakat	Kelompok	2
	Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang dibina	BUMDesa	10
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**%**	**37**
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga yang dibina	Lembaga	12
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**%**	**40**
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	70
	Pelatiahan Penyusunan Peraturan Desa dan Aset Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	336
	Program Pengembangan teknologi pedesaan	**Jumlah Pemanfaat TTG**	**Kelompok**	**30**
	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah Pelaksanaan TTG yang dilaksanakan	Kecamatan	15

Tabel II.6

Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Natuna Tahun 2018

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran
1	***2***	***3***
Meningkatkan Kemandirian Desa	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**	**1,990,443,282.00**
	Penyusunan profil desa dan kelurahan	226,326,000.00
	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	810,934,880.00
	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	376,932,760.00
	Pembinaan desa	576,249,642.00
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**380,137,000.00**
	Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah	102,495,000.00
	Pemantapan kapasitas manajemen operasional dan keuangan badan usaha milik desa (BUMD)	289,411,000.00
	Pembinaan BUMDes	277,642,000.00
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	**170,693,000.00**
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	170,693,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**626,220,980.00**
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen	169,572,000.00
	Pelatiahan Penyusunan Peraturan Desa dan Aset Desa	456,648,980.00
	Program Pengembangan teknologi pedesaan	**244,678,400.00**
	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	244,678,400.00
	Jumlah	**3,412,172,662.00**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemegang kepentingan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) yang disusun secara periodik (satu Tahun). Keberhasilan / kegagalan kinerja di ukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta Visi Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematik dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi OPD. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka di gunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	X 100%

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja =	$\frac{\text{Rencana (Realisasi – Rencana)}}{\text{Rencana}}$	X 100%

Penghitungan Capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam tujuh kategori penilaian sebagaimana mengacu pada petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Penilaian

No	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 - 30	Kurang

3.2 Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas pengukuran kinerja, sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2018.

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran Visi, Misi Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel III.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang	7	38.57	551.00

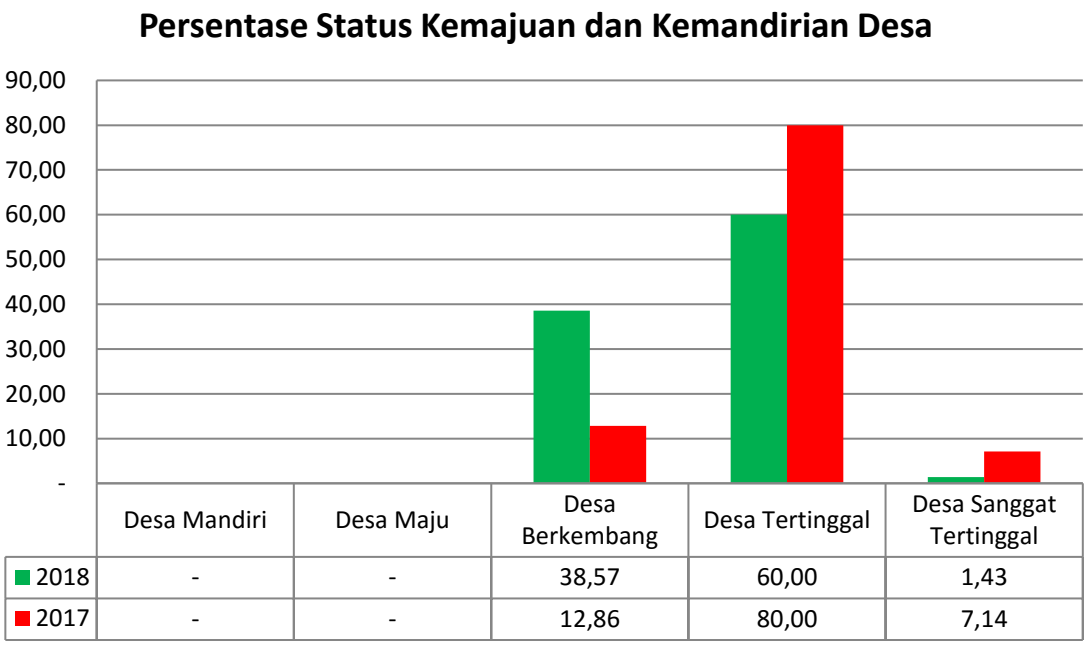

Dalam tabel diatas realisasi capaian idikator Persentase Status Desa Berkembang sebesar **551.00 Persen.** Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dimana untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Status Desa Berkembang (%) dengan target sebesar 7 persen atau 5 Desa

yang berstatus Desa Berkembang terealisasi sebesar 38.57 persen atau 27 Desa yang berstatus Desa Berkembang dari 70 Desa di Kabupaten Natuna berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun disebutkan "penetapan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Perubahan Surat Keputusan Derektur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Derektur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemadirian Desa, yakni Desa Binjai, Desa Mekar Jaya, Desa Batubi Jaya, Desa Gunung Putri, Desa Semedang, Desa Cemaga, Desa Cemaga Tengah, Desa Cemaga Utara, Desa Harapan Jaya, Desa Batu Gajah, Desa Tanjung, Desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara, Desa Teluk Buton, Desa Air Payang, Desa Tanjung Pala, Desa Sabang Mawang, Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sededap, Desa Tanjung Batang, Desa Pulau Tiga, Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Batu Berian, Desa Pangkalan, dan Desa Arung Ayam sebagai Desa berstatus berkembang di Wilayah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulaun Riau, sehingga untuk capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

Namun dalam beberapa Desa yang berstatus Berkembang Tahun 2018 tersebut ada desa yang mengalami peningkatan dan penuruan yaitu desa yang mengalami peningkatan yang sebelumnya berstatus Tertinggal menjadi Berkembang adalalah Desa Binjai, Desa Mekar Jaya, Desa Semedang, Desa Cemaga Tengah, Desa Cemaga Utara, Desa Batu Gajah, Desa Tanjung, Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara, Desa Air Payang, Desa Tanjung Pala, Desa Sabang Mawang, Desa Sabang Mawang Barat, Desa Sededap, Desa Tanjung Batang, Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Batu Berian, Desa Pangkalan dan Desa Arung Ayam.

Sedangkan Desa yang mengalami penurunan status yang sebelumnya berstatus Berkembang menjadi Tertinggal yaitu Desa Air Lengit, Desa Sepempang, dan Desa Sungai Ulu serta Desa yang mengalami penurun secara senigfikan yang sebelumnya Tertinggal menjadi Sangat Tertinggal yaitu Desa Tanjung Balau.

Rincian Status Kemanjuan dan Kemandirian tersebut dapat diilustrasikan dalam grafi berikut :

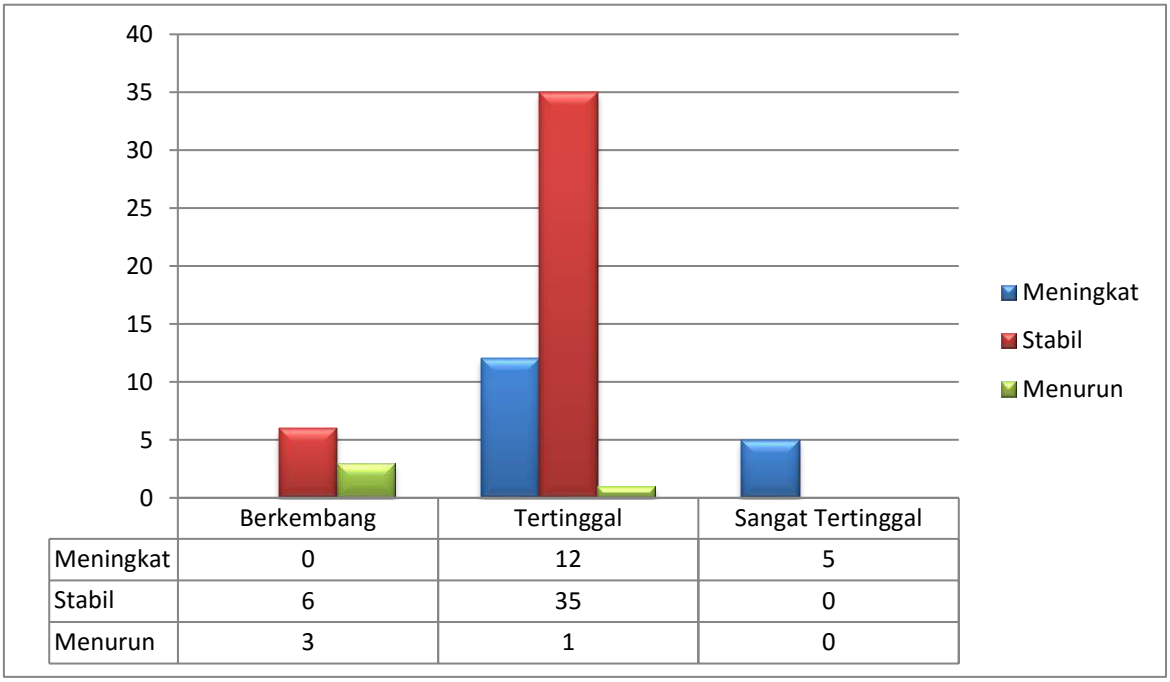

	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
Meningkat	0	12	5
Stabil	6	35	0
Menurun	3	1	0

Hal ini didukung berbagai faktor antara lain Peningkatan Ketahanan Sosial seperti Kesehatan, Pendidikan, Modal sosial, Pemukiman, dan Peningkatan Ekonomi serta Ketahahan Ekologi yang alokasikan semakin besarnya Anggaran Dana Desa (DD) maupun Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Natuna Provisi Kepulauan Riau.

Alokasi dari Pemerintah Kabupaten Natuna yang diterima desa yang diperuntukkan bagi pembangunan desa baik infrastruktur maupun bimbingan teknis peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa, sehingga perkembangan pembangunan di wilayah desa dapat dirasakan.

Namun ada juga Pemerintah Desa yang mengalami penurunan status ini merupakan catatan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna pada tahun 2019 ini akan berupaya meningkatkan status Pemerintah Desa tersebut dengan melakukan pembinaan secara khusus.

Tabel III.3

Capaian Kinerja dan Kondisi Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase Status Desa Berkembang	%	7	38.57	551.00	15

Tabel III.4

Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Kondisi Akhir
			2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1.	Persentase Status Desa Berkembang	%	12.86	38.57	15

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari pencapaian taget tahun 2017 - 2018 dengan target akhir rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2016-2021 sudah melebihi target akhir rencana strategis yaitu realisasi tahun 2018 sebesar 38.57 persen atau 27 Desa, sedangkan kondisi akhir yang tetapkan rencana strategis sebesar 15 persen atau 11 Desa yang berstatus Desa Berkembang di Kabupaten Natuna. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna akan melakukan review atau perubahan target rencana strategis yang berstatus Desa Berkembang di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel III.5
Analisa capaian kinerja sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Natuna Tahun 2018

Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Taget	Realiasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatkan Kemandirian Desa		**Persentase Status Desa Berkembang**	**%**	**7**	**38.57**	**551.00**
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**Desa/ Kelurahan**	**12**	**12**	**100**
	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan	Desa/ Kelurahan	76	76	100
	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	Desa/ Kelurahan	76	76	100
	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Jumlah PKK Aktif	PKK	91	91	100
	Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	70	70	100
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri**	**Lembaga**	**7**	**11**	**157,14**
	Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah	Jumlah Kelompok Sentra Ekonomi Masyarakat	Kelompok	2	2	100
	Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDes bersama Yang dibina	BUMDesa	10	20	200
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**%**	**37**	**37**	**100**
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga yang dibina	Lembaga	12	12	100
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**%**	**40**	**55,71**	**139,28**

Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Taget	Realiasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	70	70	100
	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Aset Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	336	336	100
	Program Pengembangan teknologi pedesaan	**Jumlah Pemanfaat TTG**	**Kelompok**	**30**	**32**	**106,67**
	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah Pelaksanaan TTG yang dilaksanakan	Kelompok	15	15	100

Analisa pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan Tabel III.5 menggambarkan tingkat pencapaian target yang di tetapkan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Peningkatan koordinasi dan komitmen yang jelas di lingkungan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan eksternal (Desa dan kecamatan Se-Kabupaten Natuna) menjadi salah satu pendorong pencapaian target capaian kinerja selain adanya dukungan dan partisifasi masyarakat juga adanya dukungan anggaran.

3.4 Realisasi Anggaran

Secara realisasi anggaran pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah, sebagai berikut :

Tabel III.6

Capaian Realiasi Anggaran terhadap Capaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Kinerja DPMD Kab.Natuna Tahun 2018

Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator Sasaran
		Anggaran	Realiasasi	%	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatkan Kemandiran Desa	**Persentase Status Desa Berkembang**	**3,412,172,662,-**	**2,539,219,943,-**	**74.42**	**551.00**
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan**	**1.990.443.282,-**	**1.423.117.473,-**	**71.50**	**100**
Penyusunan profil desa dan kelurahan	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan	226.326.000,-	205.283.000,-	90.70	100
Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	810.934.880,-	330.463.500,-	40.75	100
Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Jumlah PKK Aktif	376.932.760,-	341.445.600,-	90.59	100
Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	576.249.642,-	545.925.373,-	94.74	100
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri**	**380.137.000,-**	**283.485.100,-**	**74.57**	**157,14**
Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah	Jumlah Kelompok Sentra Ekonomi Masyarakat	102.495.000,-	73.347.500,-	71.56	100
Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDes bersama Yang dibina	277.642.000,-	210.137.600,-	75.69	200
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**170.693.000,-**	**168.726.900,-**	**98.85**	**100**
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga yang dibina	170.693.000,-	168.726.900,-	98.85	100
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**626.220.980,-**	**565.902.370,-**	**90.37**	**139,28**
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	169.572.000,-	161.769.700,-	95.40	100
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Aset Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	456.648.980,-	404.132.670,-	88.50	100
Program Pengembangan teknologi pedesaan	**Jumlah Pemanfaat TTG**	**244.678.400,-**	**97.988.100,-**	**40.05**	**106,67**
Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Jumlah Pelaksanaan TTG yang dilaksanakan	244.678.400,-	97.988.100	40.05	100
Jumlah		**3,412,172,662,-**	**2,539,219,943,-**	**74.42**	**551.00**

Akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 yang mana total anggaran belanja sebesar Rp. 8,078,144,008.00,- namun pada saat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami Penurunan Rp. 6,843,812,065.00,-.

Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan bahwa dari jumlah dari Belanja Dinas Pembeerdayaan Masyarakat dan Desa di Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4,521,572,266.00,- sementara untuk mendukung Indikator Kinerja Utama sebesar Rp. 3,412,172,662.00 atau 75.46 Persen.

Dari total belanja Indikator Kinerja Utama terealisasi anggaran sebesar Rp. 2,539,219,943.00,- atau **74.42 Persen,** sedangkan realisasi Capaian Indikator Sasaran sebesar **551.00 Persen.**

Efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 sebesar Rp. 3,412,172,662.00,- atau 75.46 Persen. Ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan belanja langsung. Inefisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 1,109,399,604.00,- atau 24.54 Persen.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menekan angka Inefisiensi sebesar **Rp. 1,109,399,604.00,-** atau **24.54 Persen** diupayakan Tahun 2019 dapat menurunkan lagi angka Inefisiensi tersebut, sehingga anggaran belanja langsung lebih mengutamakan kegiatan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV
PENUTUP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 1 Sasaran Strategis dan 1 Indikator Kinerja Utama dengan keberhasilan capaian kinerja **551.00 Persen** atau **27 Desa Berstatus Berkembang** di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Keberhasilan meningkatnya tingkat Status Desa Berkembangan melalui aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokkan yang mencakup sub-dimensi Peningkatan Pendidikan, Peningkatan Kesehatan, Peningkatan Modal Sosial dan Pemukiman. Dimensi ekonomi produksi masyarakat mencakup sub-dimensi ketersedian Produksi Masyarakat Desa, Ketersedian Pusat Pelayanan Perdagangan, Akses distribusi/logistik, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan Wilayah, Akses Kelembangaan Keuangan dan kreditan, Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan, Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. Namun demikian, beberapa ketidak berhasilan memang masih mewarnai kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan se-Kabupaten Natuna dan keseluruhan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2018 ini.

Demikian, penyusunan LKjIP tahun 2018 ini kami buat untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Ranai, 14 Januari 2019

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NATUNA,

INDRA JONI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700903 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA JONI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NATUNA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 5,834,453,620.00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) menjadi Rp. 4,521,572,266.00 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 6 November 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si	INDRA JONI, S.Sos
	NIP. 19700903 199201 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang	%	7%

Jumlah Anggaran :

1.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp.	1,990,443,282.00
2.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Rp.	170,693,000.00
3.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.	380,137,000.00
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	870,589,604.00
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	68,000,000.00
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	33,000,000.00
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	137,810,000.00
8.	Program Pengembangan teknologi pedesaan	Rp.	244,678,400.00
9.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	626,220,980.00
	Jumlah	**Rp.**	**4,521,572,266.00**

Ranai, 6 November 2018

Bupati Natuna,

Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Natuna

INDRA JONI, S.Sos
NIP. 19700903 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	%
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Status Desa Berkembang	%	7	551.00

Program		Pagu		Realisasi	%
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	870,589,604.00	Rp.	827,949,452.00	95.10
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	68,000,000.00	Rp.	27,576,000.00	83.56
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	33,000,000.00	Rp.	41,520,000.00	92.27
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	137,810,000.00	Rp.	104,688,000.00	75.97
- Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp.	1,990,443,282.00	Rp.	1,423,117,473.00	71.50
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.	380,137,000.00	Rp.	283,485,100.00	74.85
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Rp.	170,693,000.00	Rp.	168,726,900.00	98.85
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	626,220,980.00	Rp.	565,902,370.00	90.37
- Program Pengembangan teknologi pedesaan	Rp.	244,678,400.00	Rp.	97,988,100.00	40.05
Jumlah	**Rp.**	**4,521,572,266.00**	**Rp.**	**3,566,791,867.00**	**78.88**

Ranai, 31 Desember 2018

Pihak Kedua,

Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si

Pihak Pertama

INDRA JONI, S.Sos
NIP. 19700903 199201 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
CASCADING SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Sasaran Renstra :
Meningkatkan Kemandirian Desa

Indikator : Persentase Status Desa Berkembang
Target : 7 %

Sasaran Program :
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan

Indikator : Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri
Target : 7 Lembaga

- **Sasaran Kegiatan :** Pembentukan Usaha Ekonomi Spesipikasi Daerah
  Indikator : Jumlah Kelompok Sentra Ekonomi Masyarakat
  Target : 2 Kelompok
- **Sasaran Kegiatan :** Terbinanya Penasehat, Pengurus Harian dan Pengawasan BUMDesa Se-Kabupaten Natuna
  Indikator : Jumlah BUMDes Yang Dibina
  Target : 10 BUMDesa

Sasaran Program :
Meningkatnya Jumlah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna

Indikator : Jumlah Pemanfaat TTG
Target : 30 Kelompok

- **Sasaran Kegiatan :** Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna
  Indikator : Jumlah Pelaksanaan TTG
  Target : 15 Kecamatan

Sasaran Program :
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa

Indikator : Persentase Desa yang Tertib Administrasi
Target : 40 %

- **Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa
  Indikator : Jumlah Peserta
  Target : 70 Orang
- **Sasaran Kegiatan :** Peningkatan Pengelolaan Aset Desa
  Indikator : Jumlah Peserta Pelatihan
  Target : 390 Orang

Sasaran Program :
Meningkatnya Keberdayaan dan Penguatan Masyarakat

Indikator : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Target : 12 Desa/Kel

- **Sasaran Kegiatan :** Pembinaan Desa
  Indikator : Jumlah Desa yang dibina
  Target : 70 Desa
- **Sasaran Kegiatan :** Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
  Indikator : Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan
  Target : 76 Desa/ Kelurahan
- **Sasaran Kegiatan :** Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
  Indikator : Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi
  Target : 76 Desa/ Kelurahan
- **Sasaran Kegiatan :** Pembinaan PKK Aktif
  Indikator : Pembinaan PKK Aktif
  Target : 91 PKK

Sasaran Program :
Meningkatnya Peran dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa

Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Target : 37 %

- **Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Membangun Desa
  Indikator : Jumlah Lembaga Yang Dibina
  Target : 12 Lembaga